

# Pakta Keamanan Trilateral Aliansi Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (AUKUS) Dalam Perspektif Neorealisme

**Nur Mujahadah Khoiriyah,**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

nmujuhadah04@gmail.com

**Nur Aidini**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak — Tulisan ini dibuat untuk mendiskusikan terbentuknya pakta keamanan aliansi Amerika Serikat, Inggris dan Australia (AUKUS) sebagai manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni Laut Tiongkok Selatan. Terdapat dampak positif dan negatif dari Australia sebagai negara yang direncanakan akan menerima bantuan armada kapal selam bertenaga nuklir selama beberapa dekade mendatang. Topik ini menjadi penting karena AUKUS dinilai membahayakan perdamaian dan keamanan kekuasaan dengan penggunaan senjata nuklir, meskipun dengan kesepakatan ini menjadi langkah untuk menghentikan Cina berkonfrontasi atau melakukan pelanggaran perbatasan di beberapa negara di kawasan. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memperoleh berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan dan teori neorealisme. Tulisan ini turut mengkorelasikan topik AUKUS dengan konsep *high politics*. Dalam tulisan ini juga dipaparkan bagaimana dampak AUKUS dan sikap Indonesia dalam menghadapinya.

*Kata Kunci* — **AUKUS, Indonesia, High Politics, Neorealisme, ASEAN**

## I. PENDAHULUAN

Bagi negara-negara di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan dikejutkan dengan fenomena yang baru-baru terjadi pada pertengahan September atau tepatnya pada tanggal 15 September 2021, yaitu terbentuknya pakta keamanan aliansi Amerika Serikat, Inggris dan Australia (AUKUS) sebagai manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni Laut Tiongkok Selatan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keamanan kolektif melalui penyediaan armada kapal selam bertenaga nuklir selama beberapa dekade mendatang untuk Angkatan Laut Australia. Namun pakta pertahanan yang telah disetujui oleh Presiden AS Joe Biden ini rupanya menimbulkan implikasi bagi negara-negara di wilayah Indo-Pasifik, utamanya Tiongkok.

Sebagai negara yang berperan sebagai rising power di abad ke-21, Tiongkok menganggap AUKUS sebagai ancaman dan akan merusak perdamaian dan stabilitas regional sekaligus menggagalkan upaya dalam menghentikan proliferasi senjata bertenaga nuklir. Langkah yang diambil AS dan Inggris untuk mengeksport teknologi nuklir ke Australia tentu akan sangat menguntungkan bagi Australia dan kawasan,

tetapi di sisi lain langkah tersebut akan merusak hubungan bilateral yang terbangun antara Cina dan Australia. Tidak hanya berdampak bagi Cina, tetapi juga akan menimbulkan kekecewaan Perancis yang sejak 2016 telah menjadi *supplier* 12 kapal selam bertenaga diesel-elektrik (konvensional).

Menurut beberapa ahli, meskipun kesepakatan AUKUS akan menimbulkan kekacauan di awal, namun di masa mendatang Australia akan mempunyai *possibility* untuk menjaga kondisi keamanan kawasan Indo-Pasifik dengan melakukan patroli lebih lama tanpa ada gangguan dari kehadiran militer Cina yang mendominasi kawasan tersebut (Nick, 2021).

Seperti yang kita ketahui, persaingan antara dua negara yang masing-masing memiliki pengaruh kuat dalam perekonomian internasional, yaitu AS-Cina sampai saat ini tidak ditemukan titik terang karena keduanya memiliki ambisi yang sama untuk menjadi negara dengan militer dan ekonomi terkuat. Melalui kesepakatan AUKUS ini baik AS maupun Cina, berupaya untuk menahan kemungkinan salah satu pihak berhasil mengungguli pihak lain. Hal ini terbukti dari respon Cina dalam mengajukan permohonan bergabung kepada Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pasific* (CPTPP) (Delanova, 2021). Sementara dari pihak AS, terbentuknya AUKUS menjadi respon sekaligus tindakan preventif untuk menahan potensi dominasi Cina di dunia.

Menguatnya pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik nyatanya menimbulkan keresahan bagi negara-negara di kawasan. Hal ini bersumber dari tindakan agresif Cina di beberapa wilayah di kawasan, utamanya di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Beberapa tindakan agresif tersebut turut dirasakan oleh Filipina dan Indonesia. Cina tidak segan melakukan tindakan konfrontasi langsung

dengan Filipina, bahkan melakukan pelanggaran perbatasan di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Australia terdorong untuk mempersiapkan kekuatan militer yang lebih baik dengan tujuan mampu menghadapi tindakan agresif Cina dan menjamin kedaulatan negara lainnya dari ambisi Cina melalui peta sembilan garis putus-putus atau *nine-dash line* (Goodman, 2017).

Sebagai negara yang mempunyai letak geografis yang strategis baik posisi maupun peran dalam konflik Laut Cina Selatan, Indonesia secara eksplisit juga ikut terkena dampak terhadap kesepakatan AUKUS. Dengan asas bebas aktif, Indonesia perlu berupaya semaksimal mungkin menjadi pihak netral dan menghindari afiliasi dengan aliansi tersebut. Penulis menganggap topik ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana perspektif neo-realisme melihat terbentuknya aliansi Amerika Serikat, Inggris dan Australia (AUKUS) dalam keamanan militer kawasan Indo-Pasifik serta implikasi yang ditimbulkan AUKUS terhadap Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pakta Keamanan Trilateral Aliansi Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (AUKUS)**

AUKUS (Australia, UK, US) adalah perjanjian keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), yang ditandatangani pada 15 September 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat dan Inggris akan membantu Australia dalam pengembangan dan penggunaan kapal selam nuklir untuk mengerahkan pasukan militer ke barat kawasan Pasifik. Perjanjian tersebut mencakup bidang-bidang utama seperti kecerdasan buatan, perang dunia maya, dan kemampuan bawah air. Dan keterampilan serangan jarak jauh. Ini juga berisi komponen inti dari infrastruktur pertahanan nuklir, yang mungkin terbatas pada Amerika Serikat dan Inggris. Perjanjian tersebut berfokus pada kekuatan militer dan terpisah dari Aliansi

Pertukaran Informasi Lima Mata, yang mencakup Selandia Baru dan Kanada. Dengan disetujuinya pakta pertahanan trilateral AUKUS, Australia menjadi negara ketujuh di dunia yang memiliki kapal selam nuklir setelah Amerika Serikat, Republik Rakyat China (PR China), Rusia, Inggris, Prancis, dan India.

Pakta Pertahanan Tritateral AUKUS mendapat banyak perhatian dari masyarakat internasional setelah perjanjian, karena disepakati bahwa Australia akan menerima bantuan teknis dalam ekspor kapal selam nuklir dan pembangunan delapan kapal selam nuklir Amerika dan Inggris yang digunakan di Adelaide, Australia selatan. Selain itu, Pakta Pertahanan Tritateral AUKUS telah menyepakati bahwa Amerika Serikat akan menambah jumlah personel militer yang ditempatkan di pangkalan militer AS di Darwin, Australia utara. Dengan pengecualian perjanjian resmi dan diumumkan secara publik antara Amerika Serikat dan Inggris tentang pembangunan kapal selam nuklir untuk Australia, sulit untuk mengatakan hal lain di balik Pakta Pertahanan AUKUS. Yang pasti dari reaksi China terhadap pembentukan AUKUS dan reaksi kemarahan Prancis adalah menyembunyikan banyak isu strategis. Maraknya "suhu konflik" di kawasan Laut China Selatan dan pesatnya perkembangan pengaruh China melalui kemajuan teknologi dan persenjataan mungkin menjadi salah satu katalisator berdirinya AUKUS.

Kesepakatan pakta pertahanan trilateral AUKUS antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat dapat dilihat sebagai reaksi atas serangan China dalam konflik Laut China Selatan (LTS), di mana China telah memperluas wilayahnya secara signifikan melalui klaim sepihak sejak tahun 1990-an menggunakan sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) di Laut Cina Selatan yang mengakibatkan Cina terlibat konflik dalam sengketa wilayah dengan beberapa negara Asia Tenggara: Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Konflik LTS telah menjadi isu politik internasional yang besar karena

sering menimbulkan konflik militer terbuka antara China dan negara-negara Asia Tenggara tersebut, sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada ketidakstabilan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Agresi China merupakan ancaman bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan juga memiliki kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Di kawasan Indo-Pasifik, konflik kepentingan Amerika Serikat dan China menjadi lebih serius setelah kedua negara sebelumnya terlibat dalam perang dagang yang telah berlangsung sejak 2018.

Dalam konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik, perkembangan teknologi kapal selam nuklir terjadi, sementara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat terlibat dalam deklarasi resmi untuk menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Saya. Sebaliknya, Amerika Serikat melalui Australia, Inggris dan sebaliknya Pakta Pertahanan Tritateral AUKUS dapat mengancam stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik.

Hal ini dapat dianalisis karena kepemilikan kapal selam nuklir Australia, yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris (sekutu lama AS), adalah keseimbangan antara kekuatan AS dan Cina. Perimbangan kekuatan merupakan respon politik Amerika Serikat terhadap China dengan memperlengkapi China dengan Australia, yang dalam hal ini memiliki letak geografis yang dekat dengan kawasan Indo-Pasifik dan LTS, serta China di Laut China Selatan. Hal ini disertai dengan peningkatan kekuatan militer China yang selalu signifikan, yang mengancam kepentingan AS di kawasan Indo-Pasifik.

Secara teori, posisi Amerika Serikat sejalan dengan salah satu teori paradigma neorealis dalam urusan internasional yaitu keseimbangan kekuasaan. Teori keseimbangan kekuasaan pada dasarnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh suatu negara/kelompok negara dengan bekerjasama

dengan negara/kelompok negara lain untuk menghadapi ancaman negara/kelompok negara lain, hal ini menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk upaya keseimbangan. Hal ini dapat menciptakan stabilitas dan perdamaian (Mearsheimer, 2001).

Penulis berargumen bahwa topik ini berada di tingkat dan unit analisa negara-bangsa dan sistem internasional. Hasil analisis yang menekankan analisa pada tingkat negara-bangsa berpendapat hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses perhatian hanya menentukan sebatas perilaku yang berkaitan dengan tindakan internasional. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari politik luar negeri suatu negara bangsa sebagai pembuat keputusan terkait hubungan internasional secara utuh. Kasus ini termasuk dalam level analisis negara-bangsa dikarenakan pembuat keputusan atau pakta AUKUS tersebut adalah negara-bangsa, yaitu Australia, United Kingdom, dan United States.

Sementara itu, pihak yang menekankan tingkat analisa sistem internasional berasumsi bahwa bangsa-bangsa di dunia dan interaksi yang terjadi merupakan suatu sistem. Sistem tersebut menentukan perilaku aktor-aktor HI yang terlibat didalamnya. Sistem internasional dianggap sebagai penyebab terpenting terjadinya perilaku negara-bangsa karena dengan menekankan tingkat analisa sistem internasional dapat menjelaskan perilaku aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini Australia, UK, US dalam pembentukan perjanjian tersebut merupakan sebuah negara-negara yang tergabung dalam sebuah sistem yaitu sistem internasional. Dalam teori hubungan internasional dikenal dengan istilah sistem anarki, yakni konsep bahwa dunia ini tidak mempunyai pemimpin, tidak ada pemerintahan berdaulat universal. Menurut

pertimbangan tersebut sudah tentu *offensive realism* yaitu ketidakpastian terjadinya konflik pasti ada dikarenakan tidak adanya pemerintahan yang berdaulat yang membawahi negara-negara tersebut. Oleh karenanya, Australia siap siaga akan hal tersebut dengan bekerja sama lewat pakta pertahanan trilateral AUKUS bersama UK dan US untuk tujuan pengembangan dan penggunaan kapal selam nuklir untuk mengerahkan pasukan militer ke barat kawasan Pasifik.

### **AUKUS dalam Perspektif Neorealisme**

Neorealisme adalah salah satu perspektif utama dalam mengeksplorasi teori-teori modern tentang hubungan internasional. Bab ini menjelaskan asumsi dasar neorealisme tentang anarki dan struktur sistem internasional. Agenda utama hubungan dan tata krama internasional adalah sebagai titik tolak untuk menjelaskan perilaku nasional dan struktur politik internasional dalam pengembangan perspektif neo-realisme, memberikan penjelasan teoretis tentang apa yang dapat diamankan. Pemahaman terhadap isu-isu tersebut diharapkan dapat membantu pembaca menjelaskan berbagai fenomena interaksi antara urusan internasional dari perspektif neorealisme. Neo-realisme muncul sebagai kritik terhadap asumsi dasar realisme yang memandang kemanusiaan sebagai penjelasan atas berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional. (Mearsheimer, 2013: 78). Terdapat dua konsekuensi dari penerapan sistem internasional yang anarkis. Pertama, tidak ada jaminan keamanan bagi masing-masing negara dari otoritas yang berkuasa. Dalam perspektif neorealisme, di level internasional, adanya rasa saling curiga dalam hubungan antarnegara tidak hanya disebabkan oleh sifat dasar manusia, tetapi juga kekosongan otoritas. Kedua, konsekuensi ini merupakan hasil dari kondisi yang terjadi akibat dari konsekuensi pertama, yaitu relevansi dari *self-help*.

Kondisi dimana suatu negara harus menolong dirinya sendiri, agar terhindar dari ancaman negara lain. Waltz (1979) berpendapat bahwa dalam sistem internasional, kondisi anarki mengharuskan suatu negara memaksimalkan keamanannya sebagai bentuk survivalitas diri, meskipun nantinya konflik antarnegara akan mengalami peningkatan.

Pandangan neo-realistis memiliki beberapa asumsi dasar dan prinsip utama. Hal-hal untuk diingat neorealisme adalah kritik terhadap pandangan realisme klasik. Alih-alih menjelaskan tindakan satu sama lain kaum elitnya, perspektif neorealisme memilih untuk melihat kondisi sistemik dan struktural. Berdasarkan kutipan Booth, ada empat pembahasan utama neorealisme, yaitu penekanannya terhadap struktur internasional yang kacau. Negara yang harus dipertimbangkan sebagai protagonis dengan prinsip kesatuan, diwarnai dengan upaya masing-masing unit (negara) keamanan pribadi (bertahan hidup), bukan hanya makna pola pembagian tenaga menurut keahlian/kapasitas masing-masing unit (negara).

Dalam kasus ini Tiongkok adalah sebagai premis awal dari efek domino yang telah sampai ke Australia begitu juga Indonesia. John Mearsheimer mengemukakan pandangannya mengenai salah satu perkembangan dari perspektif neorealisme yaitu *offensive realism*. Dasar pemikiran *offensive realism* adalah keyakinan bahwa dalam dunia yang tidak pasti ini konflik bisa terjadi kapan saja, oleh karena itu, perlu 'mensiap-siagakan' kekuatannya. Sehingga apa yang terjadi dengan Australia dan pakta AUKUS serta kapal selam bertenaga nuklirnya, sangat sesuai dengan pemikiran *offensive realism*. Dalam hal ini pakta aukus menjadi salah satu bentuk siap siaga Australia berupa bantuan pengembangan dan pengerahan kapal-kapal selam bertenaga nuklir disamping pengerahan militer bar di kawasan Pasifik dasar.

### **Pakta Keamanan Trilateral AUKUS Sebagai Isu High Politics**

Selama Perang Dingin, dunia internasional hanya berfokus pada isu-isu *high politics*, seperti isu politik dan keamanan dikarenakan pada periode tersebut paradigma yang berkembang di kalangan para pemegang kekuasaan negara adalah realisme. Pada periode tersebut, realisme sebagai pendekatan teoritik menggambarkan situasi hubungan internasional yang saling memperebutkan kekuasaan untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing negara. Realisme menjadi perspektif yang paling mendominasi pada masa Perang Dingin dikarenakan gagasan ini memberikan eksplanasi secara sederhana, namun cukup meyakinkan mengenai aliansi, imperialisme, perang, bahkan hambatan terhadap kerja sama. Selain itu, pendekatan ini berorientasi pada sifat pokok kompetisi antara AS dan Uni Soviet. Lebih lanjut lagi, dalam realisme, *power* adalah konsep utama. Realisme menilai *high politics* atau politik tinggi mencakup keamanan militer dan isu strategis.

Sementara itu, kaum neorealisme membantah teoritis realis dalam menilai perang, adanya teori "offense-defense" yang dikemukakan oleh Robert Jervis, George Quester, dan Stephen Van Evera menyatakan bahwa realitanya konflik yang berujung pada perang dapat terjadi apabila kondisi "offense" suatu negara lebih mudah daripada "defense". Sebaliknya, apabila kondisi "defense" lebih mudah daripada "offense" maka keamanan lebih terjamin dan kerja sama internasional berkembang dengan signifikan serta negara lebih bisa mengoptimalkan keuntungan sekaligus mempertahankan diri tanpa mengancam negara lain sehingga implikasi yang disebabkan oleh sifat anarkis dapat diminimalisir.

*High politics* hadir sebagai konsep tentang perdamaian dunia dan pertahanan negara, yang mana hal tersebut mencakup kelangsung hidup suatu

negara. *High politics* didefinisikan sebagai pendekatan teoritik yang menggunakan kekuatan militer yang meliputi keamanan suatu negara. Dinamakan sebagai *high politics* karena isu keamanan dan pertahanan negara diklasifikasikan sebagai aspek politik yang berbobot dan bernilai tinggi. Di bidang diplomatik dan militer, isu *high politik* atau politik tinggi mencakup adanya kedaulatan dan keamanan.

Pembentukan AUKUS berkorelasi dengan konsep *high politics* karena aliansi tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Inggris merupakan langkah pertahanan militer untuk mencegah perkembangan Cina yang semakin signifikan. Selain itu, pembentukan AUKUS menunjukkan inisiatif dari ketiga negara tersebut untuk secara kolektif memperkuat kemiliteran demi menjaga perdamaian dan stabilitas negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik.

Secara kedaulatan, China telah menunjukkan langkah agresif dengan melanggar perbatasan perairan Indonesia. Selama dua tahun terakhir, telah ditemukan *seaglider* sebanyak tiga kali di wilayah perairan Indonesia. Dilansir dari BBC News, pada tanggal 13 September 2021, enam kapal China terlihat berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isu pakta pertahanan trilateral AUKUS yang melibatkan China dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik lainnya termasuk dalam isu *high politics*. Hal ini sesuai dengan konsep *high politics* yang mencakup kelangsungan hidup suatu negara melalui upaya kemiliteran.

### **Implikasi AUKUS terhadap Posisi Geografis Indonesia sekaligus Anggota ASEAN**

Letak geografis Indonesia membuat Indonesia berada di antara potensi pusran konflik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan AUKUS. Pada 9

September 2021, beberapa hari sebelum pakta trilateral disepakati, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kerja sama bilateral dengan *Australia Minister of Foreign Affairs* (Marise Payne) di Jakarta (Setkab, 2021). Australia dan Indonesia menyepakati beberapa kerja sama di bidang militer pada pertemuan tersebut, yaitu penandatanganan *MoU on Countering Terrorism and Violent Extremism, MoU on Cyber Cooperation and Emerging Cyber Technology*, dan kesepakatan terkait sumbangan 15 kendaraan taktis *Armoured Personnel Carrier (APC)* yang disediakan untuk TNI. Selain itu, persetujuan untuk diadakan latihan bersama antara *Australian Defence Force (ADF)* dan TNI.

Kemudian, pada tanggal 16 September 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pameran industri pertahanan yang diselenggarakan di London, Inggris sekaligus melakukan pertemuan bilateral dengan *Secretary of State for Defence*, Ben Wallace untuk menyepakati lisensi terkait produksi kapal Inggris di Indonesia, yaitu kapal tempur tipe fregat Arrowhead 140 (Setkab, 2021).

Kerja sama di bidang militer yang telah disepakati oleh Indonesia dengan Australia dan Inggris membuktikan bahwa Indonesia telah menjalani hubungan baik dengan kedua negara anggota AUKUS. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan hubungan kerja sama antara RRT dengan Indonesia yang kurang baik dikarenakan pengklaiman RRT atas Laut Natuna Utara secara sepihak melalui *nine dashed line*. Sebuah tantangan bagi Indonesia untuk tetap berperan aktif di tengah eskalasi konflik yang terjadi antara AUKUS dan RRT. Mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara *archipelago* memaksa Indonesia untuk memperkuat pertahanan lautnya secara tegas melalui perwujudan pendalian laut atau *sea control* (Yogo Prasetyo, 2021). Baik ditinjau dari segi politik, geostrategi, maupun ekonomi, kondisi

perairan laut Indonesia memiliki pengaruh yang krusial, tidak hanya di kawasan Asia Pasifik, tetapi menyebar lebih luas hingga kawasan global. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang berpotensi mendapat ancaman *chokepoints control*. Oleh karena itu, adanya isu AUKUS ini seperti bom waktu yang sewaktu-waktu berpotensi pada konflik militer atau bahkan berujung pada perang nuklir di kawasan Indo-Pasifik.

Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, sebenarnya Indonesia dapat berperan aktif dalam kerja sama multilateral bersama organisasi tersebut untuk menyuarkan stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan, terlebih ASEAN adalah salah satu aktor penting di Indo-Pasifik yang secara geografis berada di wilayah RRT dan Australia. Namun, rupanya kerja sama multilateralisme ASEAN akan sulit terwujud dikarenakan adanya perbedaan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam menyikapi kesepakatan ini.

Filipina adalah negara pendiri ASEAN yang secara tegas menunjukkan respon positif terhadap terbentuknya aliansi pakta pertahanan trilateral AUKUS. Hal ini didukung oleh pernyataan resmi yang disampaikan pada tanggal 21 September 2021 oleh Teodoro Locsin selaku *Secretary of Foreign Affairs of the Philippines*. Dukungan dari Filipina ini didorong atas dasar Filipina yang telah menjadi mitra lama AS karena ketergantungan ekonomi terhadap AS. Selain itu, dalam konflik LTS banyak wilayah Filipina yang diklaim oleh RRT, lebih tepatnya di Kepulauan Spartyly.

Sementara itu, Malaysia hanya sebagai pihak yang mengobservasi. Lain halnya dengan Indonesia, dapat dikatakan Indonesia menjadi negara yang paling keras dalam menyikapi kesepakatan ini. Selain faktor geografis yang berdekatan, dari segi historis antara Indonesia dan Australia membuat kedua negara ini memiliki cukup banyak peristiwa dan konflik

bilateral dalam ranah diplomatik di beberapa tahun terakhir. Negara pendiri ASEAN lainnya, seperti Kamboja dan Brunei Darussalam menyikapi isu ini secara pasif karena kedua negara tersebut memiliki dependensi ekonomi terhadap RRT. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gagasan multilateralisme dalam menyikapi konflik antara AUKUS dan RRT sulit diwujudkan karena setiap negara anggota ASEAN memiliki preferensi dan kepentingan nasional masing-masing.

### **Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Menanggapi Situasi AUKUS**

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut untuk memanfaatkan posisi tersebut secara optimal. Pertama, Indonesia harus berpendirian teguh sebagai negara “tawar”, yang tidak condong ke kanan maupun kiri. Dengan prinsip tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjembatani konflik-konflik yang terjadi di utara (Laut China Selatan) maupun di selatan (Kapal Selam Tenaga Nuklir), yang mana kedua konflik tersebut berpotensi pada Perang Dingin edisi kedua. Kedua, dengan perannya sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia idealnya mampu mengoptimalkan peran tersebut dengan melobi dan meyakinkan negara-negara ASEAN lainnya melalui upaya diplomasi. Sehingga dihasilkan pernyataan bersama yang mendeklarasikan bahwa ASEAN secara kolektif menolak kesepakatan AUKUS, utamanya pada program penyediaan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia karena dikhawatirkan di masa mendatang akan berujung pada situasi yang lebih keruh. Ketiga, jika upaya diplomasi di ASEAN tidak memberikan dampak positif, maka Indonesia secara nyata harus memberi perhatian lebih dalam aspek anggaran pertahanan.

Berdasarkan penjelasan yang dikeluarkan oleh Humas Sekretariat Kabinet RI dalam situs internetnya, prinsip bebas aktif tidak dapat dimaknai

sebagai upaya preventif Indonesia agar menjadi negara yang netral saja, melainkan kenetralan tersebut harus disertai dengan sikap yang tegas. Sebagian besar pihak menyatakan bahwa ketegangan RRT dan AUKUS berpotensi besar menjadi perang nuklir. Tidak hanya dikarenakan kedua belah pihak memiliki senjata nuklir, tetapi juga kedudukan RRT dan AS sebagai “pemain besar” di kawasan Indo-Pasifik.

Meskipun Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, dalam hal ini Indonesia juga perlu mempertimbangkan kepentingan nasional. Secara teknis, Indonesia cenderung memihak pada AUKUS, yang ditunjukkan dengan kerja sama militer yang terjalin dengan negara-negara AUKUS, tetapi posisi Indonesia juga terlibat dalam konflik LTS. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada pusaran ketegangan antara RRT dan AUKUS dan tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia akan terkena dampak dari kedua negara tersebut. Yang ingin ditekankan oleh Humas Sekretariat Kabinet RI adalah Indonesia harus bertindak rasional dengan memanfaatkan kondisi dan posisi tersebut sebagai kepentingan nasional, tetapi juga tetap berpegang pada prinsip politik bebas aktif.

Jika dilihat dari prinsip politik bebas aktif, kecenderungan Indonesia dengan AUKUS menjadi tanda bahwa seolah-olah prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik. Akan tetapi, kedekatan tersebut merupakan bagian dari bertindak rasional, mengingat Indonesia yang masih terlibat dengan isu Laut Natuna Utara dengan RRT. Sehingga kerja sama militer yang terjalin antara AUKUS dan Indonesia memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya alutsista TNI dan aspek-aspek pertahanan lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sikap kenetralan dalam prinsip politik bebas aktif harus disertai dengan sikap yang jelas, maka kedekatan Indonesia dengan AUKUS ini dianggap sebagai sikap

politik sebagai bagian dari kepentingan nasional, utamanya di sektor pertahanan, bukan pernyataan dukungan pada salah satu pihak secara terang-terangan seperti yang dilakukan Filipina. Selanjutnya, kecenderungan Indonesia dengan AUKUS ini juga berjalan beriringan dengan kedekatan antara RRT dan Indonesia di sektor ekonomi sehingga dalam hal ini Indonesia mampu memanfaatkan posisi strategis sebagai keuntungan di bidang ekonomi dan pertahanan dari kedua belah pihak.

Sikap yang ditunjukkan Indonesia kepada RRT dan AUKUS dapat menjadi penegasan bahwa prinsip politik bebas aktif masih tetap relevan dalam perkembangan sistem internasional saat ini meskipun perkembangan politiknya jauh berbeda dengan era Perang Dingin di masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia perlu menunjukkan prinsip tersebut melalui pengambilan keputusan yang tetap berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi tidak memperlihatkan *image* yang seolah-olah lebih condong pada satu pihak tertentu melalui langkah diplomasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini, seperti AUKUS, RRT, maupun ASEAN. Indonesia harus memanfaatkan posisinya sebagai pihak yang menjamin stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dan mencegah teradanya perang nuklir yang dikhawatirkan menjadi episode lanjutan dari Perang Dingin.

### III. KESIMPULAN

AUKUS (Australia, UK, US) adalah perjanjian keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), yang ditandatangani pada 15 September 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat dan Inggris akan membantu Australia dalam pengembangan dan penggunaan kapal selam nuklir untuk mengerahkan pasukan militer ke barat kawasan Pasifik. Penulis berargumen bahwa topik ini berada di tingkat dan



unit analisa negara-bangsa dan sistem internasional. Kasus ini termasuk dalam level analisis negara-bangsa dikarenakan pembuat keputusan atau pakta AUKUS tersebut adalah negara-bangsa, yaitu Australia, United Kingdom, dan United States. Sementara itu, pihak yang menekankan tingkat analisa sistem internasional berasumsi bahwa bangsa-bangsa di dunia dan interaksi yang terjadi merupakan suatu sistem. Sistem tersebut menentukan perilaku aktor-aktor HI yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini Australia, UK, US dalam pembentukan perjanjian tersebut merupakan sebuah negara-negara yang tergabung dalam sebuah sistem yaitu sistem internasional. Apa yang terjadi dengan Australia dan pakta AUKUS serta kapal selam bertenaga nuklirnya, sangat sesuai dengan pemikiran offensive realism yang merupakan bagian dari perkembangan pemikiran perspektif neorealisme, yaitu keyakinan bahwa dalam dunia yang tidak pasti ini konflik bisa terjadi kapan saja, oleh karena itu, perlu 'mensiap-siagakan" kekuatannya. Dalam hal ini pakta AUKUS menjadi salah satu bentuk siap siaga Australia berupa bantuan pengembangan dan pengerahan kapal-kapal selam bertenaga nuklir disamping pengerahan militer barat di kawasan Pasifik. High politics hadir sebagai konsep tentang perdamaian dunia dan pertahanan negara, yang mana hal tersebut mencakup kelangsung hidup suatu negara. Pembentukan AUKUS berkorelasi dengan konsep high politics karena aliansi tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Inggris merupakan langkah pertahanan militer untuk mencegah perkembangan Cina yang semakin signifikan. Secara teknis, Indonesia cenderung memihak pada AUKUS, yang ditunjukkan dengan kerja sama militer yang terjalin dengan negara-negara AUKUS, tetapi posisi Indonesia juga terlibat dalam konflik LTS. Kedekatan tersebut merupakan bagian dari

bertindak rasional, mengingat Indonesia yang masih terlibat dengan isu Laut Natuna Utara dengan RRT. Sikap yang ditunjukkan Indonesia kepada RRT dan AUKUS dapat menjadi penegasan dengan era Perang Dingin di masa lalu. Indonesia harus memanfaatkan posisinya sebagai pihak yang menjamin stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dan mencegah teradinya perang nuklir yang dikhawatirkan menjadi episode lanjutan dari Perang Dingin.

## REFERENSI

- Delanova, M. O. (2021). DAMPAK PAKTA PERTAHANAN TRILATERAL AUKUS TERHADAP KONDISI REGIONAL INDO-PASIFIK. *Jurnal Dinamika GLocal*, 259-285.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS) Gedung B FISIP Unair.
- Goodman, M. P. (2017, November 21). *Predatory Economics and the China Challenge*. Diambil kembali dari CSIS; Center for Strategies & International Studies: <https://www.csis.org/analysis/predator-y-economics-and-china-challenge>.
- News, B. (2021, November 17). *Aukus: Mengapa pakta pertahanan Inggris, AS, Australia prioritaskan pembuatan kapal selam untuk tangkal China di Indo-Pasifik?* Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58592794>.
- Nick, P. (2021, September 16). *Nuclear submarine deal will reshape Indo-Pacific relations*. Diambil kembali dari AP News: <https://apnews.com/article/technology-joe-biden-japan-new-zealand-australia-c4fa14d44d37fd61e457560343aa0615>
- Saeri, M. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No.2,.
- Setkab, H. (2021, November 17). *Menyikapi Potensi Eskalasi Konflik Di Kawasan Indo-Pasifik Sebagai Dampak Dari Kesepakatan Aukus*. Diambil kembali dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/>

Yogo Prasetyo, A. F. (2021). OPERASI PENYELENGGARAAN PEPERANGAN KEPULAUAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 158-168.